

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Literasi keuangan berhubungan dengan cara pengelolaan keuangan, dan semakin bagus pengelolaan keuangan seseorang maka semakin baik juga manajemen keuangan seseorang tersebut. Literasi keuangan merupakan kombinasi dari kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang perlu dimiliki seseorang untuk membuat keputusan keuangan yang sehat dan akhirnya mencapai kesejahteraan keuangan individu.<sup>1</sup> Dalam konteks Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI), seseorang dianggap berpengetahuan luas tentang keuangan jika mereka memiliki pemahaman dan keyakinan mengenai lembaga keuangan, produk dan layanan keuangan, serta kemampuan untuk mengenali fitur, manfaat, dan risiko yang terkait dengan layanan tersebut.<sup>2</sup>

Literasi keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk menangani pengelolaan keuangan sehari-hari dalam membantu individu. Literasi keuangan akan menghasilkan suatu perencanaan keuangan untuk kehidupan jangka panjang. Dengan adanya literasi keuangan dapat memudahkan dalam perencanaan keuangan sehingga seseorang dapat mengetahui apa yang belum dan sudah dilakukan untuk keuangannya.

---

<sup>1</sup> Harpa Sugiharti dan Kholida Atiyatul Maula, Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa, *Journal of Accounting and Finance*, Vol. 4 No 2, (2019): 805.

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (revisist 2017)*, (Jakarta:OJK, 2017), 16.

Berdasarkan hasil Survei Nasional tingkat Literasi yang dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Indeks Literasi Keuangan**

<b>Tahun</b>	<b>Syariah</b>	<b>Konvensional</b>
2019	8,93%	38,03%
2022	9,14%	49,68%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan tingkat literasi keuangan konvensional di Indonesia tahun 2019 mencapai 38,03% namun terjadi peningkatan sebesar 49,68%. Sedangkan untuk tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih sangat sedikit yaitu pada tahun 2022 mencapai 9,14%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan indeks literasi keuangan konvensional yang berada di angka 49,68%. Hal tersebut ironis mengingat mayoritas masyarakat Indonesia merupakan penganut agama islam. Namun hal ini terjadi disebabkan oleh *factor politik will* pemerintah serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah. Maka dari itu, perlu adanya inklusi keuangan untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat yang belum menggunakan layanan keuangan.

Inklusi keuangan yaitu sebagai seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan.<sup>3</sup> Inklusi keuangan juga memberikan kemudahan dalam mengakses dan membantu dalam

---

<sup>3</sup> Bintan, Nunung, & Lukytawati, Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Vol. 4 No. 1, (Juli 2015): 1-27.

mengelola uang secara efektif, agar bisa mengatasi kesulitan keuangan di masa depan. Inklusi keuangan memberikan ruang gerak bagi jalannya intermediasi keuangan yaitu dalam transaksi pembayaran, produk keuangan yang sesuai dengan kemampuan keuangan rumah tangga miskin, fasilitas transfer uang, kredit mikro dan jasa keuangan lainnya termasuk asuransi. Inklusi keuangan ini dapat diukur melalui tiga cara yaitu: (1) akses pelayanan keuangan, (2) penggunaan pelayanan keuangan, dan (3) pelayanan kualitas produk dan pelayanan pengiriman.<sup>4</sup>

Inklusi keuangan merupakan proses memastikan kelayakan akses terhadap produk dan layanan keuangan yang dibutuhkan oleh kelompok rentan, seperti bagian terlemah dari kelompok yang berpendapatan rendah, pada biaya yang terjangkau. Selain itu, inklusi keuangan juga menyangkut penyediaan layanan keuangan secara luas kepada individu-individu yang saat ini hanya memiliki akses terhadap produk-produk keuangan dasar.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil Survei Nasional tingkat inklusi yang dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Indeks Inklusi Keuangan**

<b>Tahun</b>	<b>Syariah</b>	<b>Konvensional</b>
2019	9,10%	76,19%
2022	12,12%	85,42%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2022)

<sup>4</sup> Adhitya Wardhono, Yulia Indrawati, dan Ciplis Gema Qori'ah, *inklusi Keuangan dalam Persimpangan Kohesi Sosial dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, (Jember: Pustaka Abadi, 2018), 7.

<sup>5</sup> Roberto Akyuwen & Jaka Waskito, *Memahami Inklusi Keuangan*, (Yogyakarta: Sekolah Pasca UGM, 2018).

Dari tabel di atas menunjukkan indeks inklusi keuangan konvensional pada tahun 2019 mencapai 76,19%, angka tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 85,42%. Sedangkan inklusi keuangan syariah mengalami peningkatan mencapai 12,12% pada tahun 2022. Walaupun mengalami peningkatan masih terbilang jauh dari inklusi keuangan konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Indonesia masih cenderung menggunakan keuangan konvensional dari pada keuangan syariah.

Keuangan konvensional merupakan industri keuangan konvensional yang mana sistem penerapannya menggunakan sistem suku bunga. Yang kerap kali sering ditemui di lingkungan masyarakat. Berbeda dengan keuangan syariah yang prinsip penerapannya, seperti tidak memungut bunga dan tidak melakukan spekulasi sehingga dapat membantu masyarakat agar terhindar dari suku bunga dan aktivitas yang spekulatif.

Masyarakat pada umumnya sering mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan. Masalah yang sering terjadi adalah pengeluaran lebih besar daripada pemasukan atau pendapatan yang diperolehnya. Seperti yang terjadi di Desa Branta Pesisir yang terletak di Kec. Tlanakan Kab.Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Masyarakat di Desa Branta Pesisir Pamekasan mayoritas pekerjaannya sebagai nelayan dan mata pencaharian nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan ikan di laut. Dengan penghasilan yang tidak menetap membuat pengelolaan keuangan masyarakat tersebut kurang baik. Dari hasil investigasi hal ini menyebabkan masyarakat setempat terjebak dalam peminjaman ke lembaga informal dengan persyaratan yang mudah dan suku bunga yang lumayan tinggi untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat

menyebabkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri dan mengalami keterpurukan dalam perekonomiannya.<sup>6</sup>

Hal tersebut terjadi karena rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai keuangan syariah. Serta kurangnya edukasi terkait jasa keuangan syariah. Seperti yang dikemukakan oleh Hamdani dalam artikelnya melalui komposiana, mengatakan bahwa angka literasi keuangan masyarakat nelayan dan pesisir yang ada di Indonesia baru mencapai 25-32 persen atau lebih rendah dari rata-rata literasi nasional khususnya di daerah pedesaan yang mencapai 34,53 persen. Hal ini mengakibatkan nelayan dan masyarakat pesisir masih belum mengenal secara optimal mengenai bank maupun lembaga non bank dengan baik.<sup>7</sup>

Maka dari itu, tingkat pemahaman masyarakat terhadap jasa keuangan syariah sangat penting dalam mendorong perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Sebab penggunaan jasa keuangan syariah oleh masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap fungsi, jenis serta karakteristik dari jasa keuangan syariah.

Di wilayah Branta Pesisir terdapat BMT NU cabang Tlanakan yang merupakan salah satu bentuk besar untuk menjadi wadah bagi masyarakat Branta Pesisir dalam melakukan transaksi keuangan syariah baik dari segi menyimpan maupun mengajukan pembiayaan agar terhindar dari unsur riba, lembaga juga diharapkan mampu memberikan edukasi tentang keuangan syariah

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2023.

<sup>7</sup> <https://www.kompasiana.com/cangkoiburong/5b4093a7bde575425e747455/begini-caranya-mengakses-modal-usaha-pada-lpmukp>, diakses pada 4 Juni 2023 Jam 16:12.

agar mereka bisa mengelola keuangannya lebih baik lagi dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Melalui gerakan literasi dan inklusi keuangan syariah, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman mengenai Lembaga Keuangan Syariah, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan syariah. Dengan demikian literasi keuangan diharapkan mampu mendorong individu untuk melakukan keputusan yang tepat dalam mengelola keuangannya. Literasi dan inklusi keuangan akan dianggap berhasil jika ada kenaikan dalam tabungan investasi, jika tabungan dan investasi masyarakat rendah maka pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut juga rendah. Peningkatan pemahaman dan kemampuan seseorang dalam literasi dan inklusi keuangan syariah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di desa Branta Pesisir yang selanjutnya akan berujung pada turunnya kemiskinan di masyarakat.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ubaidillah & Hasanah menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat sangkanayu sebesar 56,88% atau dapat dikatakan rendah.<sup>8</sup> Dalam penelitian Said dan Amiruddin menunjukkan bahwa literasi keuangan Syariah civitas akademika UIN Alauddin Makasar masih rendah. Literasi keuangan dari kelompok responden perempuan lebih tinggi dari responden laki-laki.<sup>9</sup> Penelitian yang dilakukan Muksal, Hasnita dan Nazira menunjukkan bahwa tingkat literasi

---

<sup>8</sup> Ubaidillah & Mia Nur Hasanah, Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat SangkanayuMrebet Kabupaten Purbalingga, *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol 4 No 2, (2021): 188-201.

<sup>9</sup> Said dan Amiruddin, Literasi Keuangan Islam di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Studi Kasus UIN Aluiddin Makasar), Vol 17 No 1. (Juni 2017): 44-64.

keuangan di Kota Banda Aceh sebesar 89,70% , sedangkan inklusi keuangan syariahnya sebesar 83,4%. jika dikategorikan kedalam kriteria literasi dan inklusi menurut Chen & volpe maka literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat Kota Banda Aceh berada dikategori tinggi. Literasi keuangan yang baik akan memudahkan masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa lembaga keuangan secara efektif dan efisien.<sup>10</sup>

Dari masalah yang dijelaskan pada latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tema skripsi yang berjudul “ **Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Lingkungan Masyarakat Desa Branta Pesisir Pamekasan**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat literasi keuangan syariah pada masyarakat desa Branta Pesisir?
2. Bagaimana tingkat inklusi keuangan syariah pada masyarakat desa Branta Pesisir?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>10</sup> Muksal, Nevi Hasnita & Putri Nazira, Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah pada Masyarakat Kota Banda Aceh, *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, Vol. 7 No. 1, (Juni 2023): 18-34.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis memaparkan tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat literasi keuangan syariah pada masyarakat desa Branta Pesisir.
2. Untuk mengetahui tingkat inklusi keuangan syariah pada masyarakat desa Branta Pesisir

#### **D. Asumsi Penelitian**

Asumsi dasar adalah suatu hal yang diyakini atau dianggap benar. Sejumlah asumsi-asumsi dapat berbeda antara satu dengan yang lain, karena apa yang dianggap benar oleh yang satu, dapat dianggap tidak benar oleh yang lain.

Oleh sebab itu, asumsi-asumsi tersebut perlu dirumuskan. Asumsi-asumsi yang di rumuskan dalam penelitian ini dengan judul **“Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Lingkungan Masyarakat Desa Branta Pesisir Pamekasan”**.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian diharapkan memiliki kegunaan bagi beberapa pihak, diantaranya:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

###### **a. Bagi peneliti**



Hasil penelitian ini menjadikan tolak ukur kemampuan dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Serta menambah wawasan peneliti tentang tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di lingkungan masyarakat desa Branta Pesisir Pamekasan serta dapat mengetahui fakta lapangan dengan jelas dan dengan teori yang sudah ada.

**b. Bagi Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) MADURA**

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Madura sehingga dapat menambah khazanah keilmuan tentang tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di lingkungan masyarakat desa Branta Pesisir Pamekasan.

**c. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, pengetahuan, dan konsep serta dapat dijadikan tambahan referensi untuk peneliti selanjutnya.

**2. Kegunaan Praktis**

**a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah**

Penelitian ini diharapkan dapat membrikan masukan bagi pihak pengelola jasa lembaga keuangan syariah untuk lebih meningkatkan proses edukasi terkait keuangan syariah kepada masyarakat.

**b. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan preferensi masyarakat dalam memahami pengelolaan keuangan yang berbasis syariah. Sehingga mereka tahu apa yang membuat masyarakat tidak paham dan tidak minat dalam menggunakan lembaga keuangan syariah.

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini ada dua variabel yang menjadi fokus penelitian, yaitu literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah. Agar variabel yang menjadi fokus tersebut tidak meluas, maka perlu adanya batasan terhadap materi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini “Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Lingkungan Masyarakat Desa Branta Pesisir Pamekasan”.

## **G. Definisi Istilah**

Untuk lebih memahami dan menghindari kesalah pahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan istilah-istilah yang perlu dijelaskan dari judul proposal skripsi ini, “Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Di Lingkungan Masyarakat Desa Branta Pesisir Pamekasan”, yaitu sebagai berikut:

### **1. Literasi Keuangan**

Literasi keuangan adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif untuk kesejahteraan finansial.<sup>11</sup>

## **2. Inklusi Keuangan**

Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses akan berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>12</sup>

## **3. Keuangan Syariah**

keuangan syariah adalah cara untuk menerapkan prinsip-prinsip islam tentang ekonomi ke dalam praktik. Upaya untuk mengembangkan jenis ekonomi islam tertentu, berdasarkan ajaran kitab suci al-qur'an dan hokum agama islam, syariah dapat dilihat sebagai manifestasi dari keinginan yang dipendam oleh umat islam untuk mempertahankan, atau mendapatkan kembali identitas mereka sendiri.<sup>13</sup>

## **H. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Ade Gunawan, *Monograf Pengukuran Literasi Keuangan Syariah dan Literasi Keuangan*, (Medan: UMSU Press, 2022), 29.

<sup>12</sup> Kusumaningtuti S. Soetiono & Cecep Setiawan, *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 10.

<sup>13</sup> Nur Kholis, *Pengantar Keuangan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 5.

**Tabel 1.3**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Mohammad Arif Budiman, dkk (2018). <sup>14</sup>	Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Lingkungan Perguruan Tinggi: Studi pada Politeknik Negeri Banjarmasin	Kuantitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah dikalangan pegawai Poliban relative sudah cukup baik, sedangkan tingkat inklusinya masih rendah.	Perbedaannya objek penelitian budiman kepada kalangan pegawai sedangkan di dalam penelitian ini objek pada masyarakat.
2.	Amir Hamzah (2019). <sup>15</sup>	Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Syariah di Kalangan Tenaga Pendidik	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan sikap keuangan positif signifikan terhadap	Perbedaannya objek penelitiannya di kalangan tenaga kerja pendidik sedangkan dalam

<sup>14</sup> Budiman, dkk., Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Lingkungan Perguruan Tinggi: Studi pada Politeknik Negeri Banjarmasin, *In Proceeding of National Conference on Asbis*, Vol. 3, (December 2018): 314-321.

<sup>15</sup> Amir Hamzah, Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Syariah Di Kalangan Tenaga Pendidik Kabupaten Kuningan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, Vol 7(2), Oktober 2019): 175-187.

		Kabupaten Kuningan.		inklusi keuangan syariah, perilaku keuangan positif signifikan pada inklusi keuangan syariah, dan pengetahuan keuangan positif pada inklusi keuangan syariah.	penelitian ini di masyarakat.
3.	Rahmaton Wahyu (2019). <sup>16</sup>	Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Kota Banda Aceh.	Kuantitatif deskriptif	Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Kota Banda Aceh sebesar 71,99%, jika persentase tersebut dikategorikan kedalam kriteria tingkat literasi keuangan	Penelitian Rahmatun hanya literasi keuangan syariah, sedangkan dalam penelitian ini literasi dan inklusi keuangan syariah.

<sup>16</sup> Rohmatun Wahyu, *Anallisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Kota Banda Aceh*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019),74-77.

				menurut Chen dan Volpe maka 71,99% berada pada kategori sedang. Nilai rata-rata yang diperoleh pada aspek pengetahuan keuangan dasar syariah adalah 83,22%, tabungan dan pinjaman syariah sebesar 66,67%, asuransi syariah 65,93%, dan aspek investasi syariah 71,85%.	
4.	Rosy Wulandari, (2019). <sup>17</sup>	Pengaruh Literasi dan Inklusi Keuangan terhadap	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kinerja	Perbedaannya didalam penelitian ini tidak terdapat uji pengaruh

<sup>17</sup> Rosy Wulandari, *Pengaruh Literasi dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus pada UMKM Provinsi DKI Jakarta)*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatulah Jakarta, 2019), 91-93.

		Kinerja UMKM (Studi Kasus pada UMKM Provinsi DKI Jakarta).		UMKM dapat dijelaskan oleh variabel literasi keuangan dan inklusi keuangan adalah sebesar 13,9%.	terhadap kinerja UMKM.
--	--	---	--	--	------------------------------